



GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
  - b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
  - c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya serta untuk memenuhi asas keadilan setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan bermutu dan tanpa diskriminatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona *Virus Disease* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.

14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
16. Sekolah Terintegrasi adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi.
17. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
19. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah, Satuan Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. SMA; dan
  - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekolah Terintegrasi yang menyelenggarakan pendidikan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi.

BAB III  
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan PPDB sebagaimana ayat (1), dapat berubah jika terjadi kondisi darurat yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
  - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - e. daftar ulang; dan
  - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 4

Petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB (petunjuk teknis PPDB) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang mandat penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis PPDB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:
  - a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
  - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. jalur zonasi;
  - b. jalur Afirmasi;
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru; dan
  - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali, dan bagi anak guru.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi berdasarkan:
  - a. nilai rapor atau ujian sekolah; dan



- b. hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.
- (6) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Sekolah Kerja Sama;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

#### Pasal 10

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
- b. jalur Afirmasi, sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
- d. jalur prestasi, sebanyak sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua.

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB tidak dikaitkan dengan zonasi.
- (3) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## Pasal 12

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

## Paragraf 2

## Jalur Zonasi

## Pasal 13

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW, dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Desa atau Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

## Paragraf 3

## Jalur Afirmasi

## Pasal 15

- (1) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

## Pasal 17

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orangtua dapat digunakan untuk Peserta Didik anak guru, dibuktikan dengan surat tugas dari instansinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## Paragraf 5

## Jalur Prestasi

## Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Prestasi berbasis nilai rapor atau ujian sekolah; dan
  - b. Prestasi berbasis hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## Bagian Keenam

### Seleksi

#### Pasal 19

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang berusia lebih tua.

#### Pasal 21

Seleksi jalur afirmasi mengutamakan peserta didik dengan domisili terdekat menuju sekolah tujuan sampai memenuhi kuota minimal 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

#### Pasal 22

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

#### Pasal 23

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis nilai rapor atau ujian sekolah, dilaksanakan berdasarkan hasil pemeringkatan nilai yang diurutkan dari nilai terbesar sampai memenuhi kuota.
- (2) Seleksi jalur prestasi hasil perlombaan, dilakukan dengan urutan prioritas:
  - a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional dan juara ke-1 hasil perlombaan tingkat nasional; dan
  - b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

## Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik SMK dapat mempertimbangkan nilai rapor atau nilai ujian sekolah, atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi dan/atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik SMK diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis PPDB.

## Pasal 25

Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## Bagian Ketujuh

## Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

## Pasal 27

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

## Pasal 28

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
  1. dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) Peserta Didik; dan
  2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik;
 disesuaikan dengan jenis kekhususan.

## Bagian Kedelapan

### Biaya

#### Pasal 29

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

### PENYELENGGARA PPDB

#### Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## BAB V

### PENGADUAN

#### Pasal 32

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
  - a. provinsi;
  - b. cabang dinas; dan
  - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## BAB VI

### INFORMASI

#### Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

#### Pasal 35

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.

#### Pasal 37

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

## BAB IX

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 38

- (1) Perpindahan dapat dilakukan setelah peserta didik melaksanakan pembelajaran minimal 1 (satu) tahun pembelajaran, kecuali perpindahan dengan alasan mengikuti tugas orang tua dapat dilaksanakan minimal setelah satu semester di sekolah asal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan peserta didik, diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, sekolah penerima perpindahan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB XI

## SANKSI

## Pasal 40

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31





## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31

TANGGAL : 20 April 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

## ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA BARAT

## 1. KABUPATEN BOGOR

Zonas i	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. CIBINONG	SMA NEGERI 1 CIBINONG
	KEC. CITEUREUP	SMA NEGERI 2 CIBINONG
	KEC. BABAKANMADANG	SMA NEGERI 3 CIBINONG
	KEC. SUKARAJA	SMA NEGERI 4 CIBINONG
		SMA NEGERI 1 CITEUREUP
		SMA NEGERI 1 BABAKAN MADANG
	SMA NEGERI 1 SUKARAJA	
<b>B</b>	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI BOGOR
	KEC. CISARUA	SMA NEGERI 1 CISARUA
	KEC. MEGAMENDUNG	SMA NEGERI 1 MEGAMENDUNG
	KEC. CIGOMBONG	SMA NEGERI 1 CIGOMBONG
	KEC. CARINGIN	SMA NEGERI 1 CARINGIN
	KEC. CIJERUK	SMA NEGERI 1 CIJERUK
<b>C</b>	KEC. DRAMAGA	SMA NEGERI 1 DRAMAGA
	KEC. CIAMPEA	SMA NEGERI 1 CIAMPEA
	KEC. TENJOLAYA	SMA NEGERI 1 TENJOLAYA
	KEC. CIOMAS	SMA NEGERI 1 CIOMAS
	KEC. TAMANSARI	SMA NEGERI 1 TAMANSARI
<b>D</b>	KEC. CILEUNGS	SMA NEGERI 1 CILEUNGS
	KEC. GUNUNGPUTRI	SMA NEGERI 2 CILEUNGS
	KEC. KLAPANUNGGAL	SMA NEGERI 1 GUNUNG PUTRI
		SMA NEGERI 2 GUNUNG PUTRI
	SMA NEGERI 1 KLAPANUNGGAL	
<b>E</b>	KEC. JONGGOL	SMA NEGERI 1 JONGGOL
	KEC. SUKAMAKMUR	SMA NEGERI 2 JONGGOL
	KEC. CARIU	SMA NEGERI 1 SUKAMAKMUR
	KEC. TANJUNGSARI	SMA NEGERI 1 CARIU
		SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI
<b>F</b>	KEC. JASINGA	SMA NEGERI 1 JASINGA
	KEC. TENJO	SMA NEGERI 1 TENJO
	KEC. CIGUDEG	SMA NEGERI 1 CIGUDEG
	KEC. PARUNGPANJANG	SMA NEGERI 1 PARUNG PANJANG
	KEC. SUKAJAYA	SMA NEGERI 1 SUKAJAYA
<b>G</b>	KEC. LEUWILIANG	SMA NEGERI 1 LEUWILIANG
	KEC. NANGGUNG	SMA NEGERI 1 NANGGUNG
	KEC. LEUWISADENG	SMA NEGERI 1 LEUWISADENG

<b>Zonas i</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Daftar SMA/MA</b>
	KEC. CIBUNGBULANG	SMA NEGERI 1 CIBUNGBULANG SMA NEGERI 1 PAMIJAHAN
	KEC. PAMIJAHAN	
<b>H</b>	KEC. GUNUNGSINDUR	SMA NEGERI 1 GUNUNG SINDUR SMA NEGERI 1 RUMPIN SMA NEGERI 1 PARUNG SMA NEGERI 1 CISEENG SMA NEGERI 1 TAJURHALANG SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE SMA NEGERI 1 RANCABUNGUR
	KEC. RUMPIN	
	KEC. PARUNG	
	KEC. CISEENG	
	KEC. TAJURHALANG	
	KEC. BOJONGGEDE	
	KEC. KEMANG	
	KEC. RANCABUNGUR	

## 2. KOTA BOGOR

<b>Zonasi</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Daftar SMA/MA</b>
<b>A</b>	KOTA BOGOR	SMA NEGERI 1 BOGOR SMA NEGERI 2 BOGOR SMA NEGERI 3 BOGOR SMA NEGERI 4 BOGOR SMA NEGERI 5 BOGOR SMA NEGERI 6 BOGOR SMA NEGERI 7 BOGOR SMA NEGERI 8 BOGOR SMA NEGERI 9 BOGOR SMA NEGERI 10 BOGOR
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. BOJONG GEDE, KAB. BOGOR	
	KEC. KEMANG, KAB. BOGOR	
	KEC. DRAMAGA, KAB. BOGOR	
	KEC. CIOMAS, KAB. BOGOR	
	KEC. TAMANSARI, KAB. BOGOR	
	KEC. CIJERUK, KAB. BOGOR	
	KEC. CARINGIN, KAB. BOGOR	
	KEC. CIAWI, KAB. BOGOR	
	KEC. SUKARAJA, KAB. BOGOR	

## 3. KOTA DEPOK

<b>Zonasi</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Daftar SMA/MA</b>
<b>A</b>	KOTA DEPOK	SMA NEGERI 1 DEPOK SMA NEGERI 2 DEPOK SMA NEGERI 3 DEPOK SMA NEGERI 4 DEPOK SMA NEGERI 5 DEPOK SMA NEGERI 6 DEPOK SMA NEGERI 7 DEPOK SMA NEGERI 8 DEPOK SMA NEGERI 9 DEPOK SMA NEGERI 10 DEPOK SMA NEGERI 11 DEPOK SMA NEGERI 12 DEPOK SMA NEGERI 13 DEPOK
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR	
	KEC. PARUNG, KAB. BOGOR	
	KEC. TAJUR HALANG, KAB. BOGOR	
	KEC. BOJONG GEDE, KAB. BOGOR	
	KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR	
	KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	
	KEC. JATISAMPURNA, KOTA BEKASI	

## 4. KOTA BEKASI

<b>Zonas i</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Daftar SMA/MA</b>
<b>A</b>	KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 BEKASI SMA NEGERI 2 BEKASI SMA NEGERI 3 BEKASI
	DAERAH IRISAN :	
	GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR	

CILEUNGI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 4 BEKASI
LEUWINANGGUNG KAB DEPOK	SMA NEGERI 5 BEKASI
NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR	SMA NEGERI 6 BEKASI
BABELAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 7 BEKASI
TAMBUN SELATAN KAB BEKASI	SMA NEGERI 8 BEKASI
SETU KAB BEKASI	SMA NEGERI 9 BEKASI
TARUMAJAYA KAB BEKASI	SMA NEGERI 10 BEKASI
	SMA NEGERI 11 BEKASI
	SMA NEGERI 12 BEKASI
	SMA NEGERI 13 BEKASI
	SMA NEGERI 14 BEKASI
	SMA NEGERI 15 BEKASI
	SMA NEGERI 16 BEKASI
	SMA NEGERI 17 BEKASI
	SMA NEGERI 18 BEKASI
	SMA NEGERI 19 BEKASI
	SMA NEGERI 20 BEKASI
	SMA NEGERI 21 BEKASI
	SMA NEGERI 22 BEKASI

## 5. KABUPATEN BEKASI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN BEKASI	SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
	BATUJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN
	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN
	KARANGSARI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN
	CIBUCIL, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 7 TAMBUN SELATAN
	PASIR RANDU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 8 TAMBUN SELATAN
	TUNGGAK JATI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 9 TAMBUN SELATAN
	SUKAMAHI, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 SETU
	SUKAMAJU, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 SETU
	RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 1 BABELAN
	KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG	SMA NEGERI 2 BABELAN
	CIMUNING, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 3 BABELAN
	MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 TARUMAJAYA
	MUSTIKASARI, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIBITUNG
	DURENJAYA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIBITUNG
	RAWALUMBU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT
	UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG BARAT
	PONDOK UNGU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA
	HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA
	MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA
	MARGAHAYU, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR
	BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 KARANG BAHAGIA
	BEKASI UTARA, KOTA BEKASI	SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN
	CILEUNGI KAB. BOGOR	SMA NEGERI 1 CIKARANG PUSAT
	JONGGOL KAB. BOGOR	SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT
		SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN
		SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN
		SMA NEGERI 1 SERANG BARU
		SMA NEGERI 1 CIBARUSAH
		SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU
	SMA NEGERI 1 TAMBELANG	
	SMA NEGERI 1 SUKAWANGI	
	SMA NEGERI 1 SUKATANI	
	SMA NEGERI 2 SUKATANI	
	SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN	
	SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG	
	SMA NEGERI 1 SUKAKARYA	
	SMA NEGERI 1 PEBAYURAN	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
		SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA

## 6. KABUPATEN KARAWANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	PAKISJAYA	SMA NEGERI 1 BATUJAYA
	BATUJAYA	SMA NEGERI 1 TIRTAJAYA
	TIRTAJAYA	SMA NEGERI 1 CIBUAYA
	CIBUAYA	SMA NEGERI 1 PEDES
	JAYAKERTA	SMA NEGERI 1 RENGASDENGKLOK
	PEDES	SMA NEGERI 1 RAWAMERTA
	CILEBAR	
	KUTA WALUYA	
	RENGASDENGKLOK	
	RAWAMERTA	
<b>B</b>	TEMPURAN	SMA NEGERI 1 TEMPURAN
	CILAMAYA KULON	SMA NEGERI 1 CILAMAYA
	CILAMAYA WETAN	SMA NEGERI 1 BANYUSARI
	BANYUSARI	SMA NEGERI 1 JATISARI
	JATISARI	SMA NEGERI 1 CIKAMPEK
	KOTA BARU	SMA NEGERI 2 CIKAMPEK
	CIKAMPEK	SMA NEGERI 3 CIKAMPEK
	TIRTAMULYA	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	PURWASARI	SMA NEGERI 1 TELAGASARI
	LEMAHABANG	
TALAGASARI		
<b>C</b>	MAJALAYA	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KLARI	SMA NEGERI 1 KLARI
	KARAWANG TIMUR	SMA NEGERI 2 KLARI
	KARAWANG BARAT	SMA NEGERI 2 KARAWANG
	TELUKJAMBE BARAT	SMA NEGERI 5 KARAWANG
	TELUKJAMBE TIMUR	SMA NEGERI 1 KARAWANG
	CIAMPEL	SMA NEGERI 3 KARAWANG
	PANGKALAN	SMA NEGERI 4 KARAWANG
	TEGALWARU	SMA NEGERI 6 KARAWANG
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE BARAT
	DESA BALONGSARI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 TELUKJAMBE
	DESA KUTAWARGI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 2 TELUKJAMBE TIMUR
	DESA MEKARJAYA, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 CIAMPEL
	DESA PASIRKALIKI, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 PANGKALAN
	DESA PURWAMEKAR, KEC. RAWAMERTA	SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	DESA SEKARWANGI, KEC. RAWAMERTA	
	DESA SUKAMERTA, KEC. RAWAMERTA	
	DESA PASIRKAMUNING, KEC. TELAGASARI	
	DESA PASIRMUkti, KEC. TELAGASARI	
	DESA PASIRTALAGA, KEC. TELAGASARI	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	DESA TALAGAMULYA, KEC. TELAGASARI	
	DESA TALAGASARI, KEC. TELAGASARI	
	DESA CENKONG, KEC. PURWASARI	
	DESA DARAWOLONG, KEC. PURWASARI	
	DESA MEKARJAYA, KEC. PURWASARI	

## 7. KABUPATEN PURWAKARTA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	PURWAKARTA	SMA NEGERI 1 PURWAKARTA SMA NEGERI 2 PURWAKARTA SMA NEGERI 3 PURWAKARTA SMA NEGERI 1 BUNGURSARI SMA NEGERI 1 JOMIN SMA NEGERI 1 CAMPAKA SMA NEGERI 1 CIBATU
	BUNGURSARI	
	CAMPAKA	
	CIBATU	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA CIPEUNDEUY, KEC. BOJONG	
<b>B</b>	PESAWAHAN	SMA NEGERI 1 PASAWAHAN SMA NEGERI 1 WANAYASA
	PONDOKSALAM	
	WANAYASA	
	KIARA PEDES	
	BOJONG	
<b>C</b>	DARANGDAN	SMA NEGERI 1 DARANGDAN SMA NEGERI 1 PLERED SMA NEGERI 1 MANIIS SMA NEGERI 1 TEGALWARU
	PLERED	
	MANIIS	
	TEGALWARU	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA BOJONG BARAT, KEC. BOJONG DESA BOJONG TIMUR, KEC. BOJONG	
<b>D</b>	BABAKAN CIKAO	SMA NEGERI 1 BABAKAN CIKAO SMA NEGERI 1 JATILUHUR SMA NEGERI 1 SUKATANI SMA NEGERI 2 SUKATANI SMA NEGERI 1 SUKASARI
	JATILUHUR	
	SUKATANI	
	SUKASARI	

## 8. KABUPATEN SUBANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	SUBANG	SMA NEGERI 1 SUBANG SMA NEGERI 2 SUBANG SMA NEGERI 3 SUBANG SMA NEGERI 4 SUBANG SMA NEGERI 1 JALAN CAGAK SMA NEGERI 1 TANJUNGSANG SMA NEGERI 1 SARANGPANJANG
	CIBOGO	
	CIJAMBE	
	DAWUAN	
	JALAN CAGAK	
	SERANG PANJANG	
	SAGALA HERANG	
	CIATER	
	TANJUNGSANG	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	CISALAK	
	KASOMALANG	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA JABONG, KEC. PAGADEN	
	DESA CIJAHU, KEC. PAGADEN	
	DESA BALIMBING, KEC. PAGADEN	
	DESA CIKOLE, KEC. LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	
	DESA PUSAKAMULYA, KEC. KIARAPEDES, KAB. PURWAKARTA	
	DESA CIKARAMAS, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA TANJUNGMEDAR, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
	DESA JINGKANG, KEC. TANJUNGMEDAR, KAB. SUMEDANG	
<b>B</b>	PURWADADI	SMA NEGERI 1 PURWADADI SMA NEGERI 1 KALIJATI SMA NEGERI 1 PATOKBEUSI SMA NEGERI 1 PABUARAN SMA NEGERI 1 CIPEUNDEUY SMA NEGERI 1 BLANAKAN SMA NEGERI 1 CIASEM
	KALIJATI	
	CIKAUM	
	PATOKBEUSI	
	PABUARAN	
	CIPEUNDEUY	
	BLANAKAN	
	CIASEM	
	SUKASARI	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA DAWUAN KALER, KEC. DAWUAN	
	DESA MANYETI, KEC. DAWUAN	
	DESA CAMPAKA, KEC. CAMPAKA, KAB. PURWAKARTA	
DESA CIBATU, KEC. CIBATU, KAB. PURWAKARTA		
<b>C</b>	PAMANUKAN	SMA NEGERI 1 PAMANUKAN SMA NEGERI 1 PUSAKA NEGARA SMA NEGERI 1 PAGADEN SMA NEGERI 2 PAGADEN SMA NEGERI 1 COMPRENG
	TAMBAK DAHAN	
	LEGON KULON	
	PUSAKA NEGARA	
	PUSAKA JAYA	
	PAGADEN	
	PAGADEN BARAT	
	BINONG	
	COMPRENG	
	CIPUNEGARA	
	DAERAH IRISAN :	
	DESA SUKASARI, KEC. SUKASARI	
	DESA SUKAREJA, KEC. SUKAREJA	

## 9. KOTA SUKABUMI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
--------	-----------	---------------

<b>A</b>	KOTA SUKABUMI	SMA NEGERI 1 SUKABUMI
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 SUKABUMI
	KEC. SUKABUMI, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 3 SUKABUMI
	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 4 SUKABUMI
	DESA SUKARAJA, KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI	SMA NEGERI 5 SUKABUMI
	KEC. KADUDAMPIT, KAB. SUKABUMI	
	KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI	
	DESA NEGLASARI, KEC. NYALINDUNG, KAB. SUKABUMI	

## 10. KABUPATEN SUKABUMI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. KABANDUNGAN	SMAN 1 KABANDUNGAN
	KEC. KALAPANUNGGAL	SMAN 1 PARAKANSALAK
	KEC. PARAKANSALAK	SMAN 1 CIDAHU
	KEC. BOJONGGENTENG	SMAN 1 CIKIDANG
	KEC. GUNUNG GURUH	SMAN 1 CIBADAK
	KEC. CISAAT	SMAN 1 CISAAT
	KEC. KADUDAMPIT	SMAN 1 SUKARAJA
	KEC. SUKABUMI	SMAN 1 PARUNGKUDA
	KEC. SUKARAJA	SMAN 1 CICURUG
	KEC. CIKIDANG	SMAN 1 WARUNGKIARA
	KEC. CIBADAK	SMAN 1 CIKEMBAR
	KEC. CICANTAYAN	SMAN 1 NAGRAK
	KEC. CIDAHU	SMAN 1 CIREUNGHAS
	KEC. PARUNGKUDA	
	KEC. CIAMBAR	
	KEC. CICURUG	
	KEC. SUKALARANG	
	KEC. CIREUNGHAS	
	KEC. KEBONPEDES	
	KEC. GEGERBITUNG	
	KEC. WARUNGKIARA	
	KEC. CIKEMBAR	
	KEC. NAGRAK	
	KEC. CARINGIN	
KEC. WARUDOYONG		
DAERAH IRISAN :		
KOTA SUKABUMI		
<b>B</b>	KEC. CISOLOK	SMAN 1 CISOLOK
	KEC. CIKAKAK	SMAN 1 CIKAKAK
	KEC. PELABUHAN RATU	SMAN 1 SIMPENAN
	KEC. SIMPENAN	SMAN 1 PELABUHANRATU
	KEC. BANTARGADUNG	
<b>C</b>	KEC. NYALINDUNG	SMAN 1 NYALINDUNG
	KEC. PURABAYA	SMAN 1 JAMPANGTENGAH
	KEC. JAMPANG TENGAH	SMAN 1 LENGKONG
	KEC. LENGKONG	SMAN 1 SAGARANTEN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. PABUARAN	
	KEC. SAGARANTEN	
	KEC. CURUGKEMBAR	
	KEC. CIDADAP	
	KEC. CIDOLOG	
<b>D</b>	KEC. TEGALBULEUD	SMAN 1 KALIBUNDER
	KEC. KALIBUNDER	SMAN 1 SURADE
	KEC. CIBITUNG	SMAN 1 CIRACAP
	KEC. SURADE	SMAN 1 CIEMAS
	KEC. CIRACAP	SMAN 1 JAMPANGKULON
	KEC. CIEMAS	
	KEC. WALURAN	
	KEC. CIMANGGU	
	KEC. JAMPANGKULON	

## 11. KABUPATEN CIANJUR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN CIANJUR	SMA NEGERI 1 CIBINONG
		SMA NEGERI 2 CIBINONG
		SMA NEGERI 1 KADUPANDAK
		SMA NEGERI 1 PAGELARAN
		SMA NEGERI 1 PASIRKUDA
		SMA NEGERI 1 SINDANG BARANG
		SMA NEGERI 1 CIANJUR
		SMA NEGERI 2 CIANJUR
		SMA NEGERI 1 CIBEBER
		SMA NEGERI 1 CILAKU
		SMA NEGERI 1 PACET
		SMA NEGERI 1 SUKANAGARA
		SMA NEGERI 1 SUKARESMI
		SMA NEGERI 1 WARUNGKONDANG
		SMA NEGERI 1 CIRANJANG
		SMA NEGERI 1 BOJONGPICUNG
	SMA NEGERI 1 KARANG TENGAH	
	SMA NEGERI 1 MANDE	

## 12. KABUPATEN BANDUNG BARAT

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 1 BATUJAJAR
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
	KEC. CIDADAP, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CILILIN
	KEC. CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPATAT
	KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPEUNDEUY
	KEC. CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIPONGKOR
	KEC. CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CISARUA
	KEC. JALAN CAGAK, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 GUNUNG HALU
	KEC. CIATER, KAB. SUBANG	SMA NEGERI 1 LEMBANG
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 NGAMPRAH
	KEC. KUTA WARINGIN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 1 PADALARANG
	SMA NEGERI 1 PARONGPONG	
	SMA NEGERI 1 RONGGA	
	SMA NEGERI 1 SAGULING	



Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. HAUR WANGI, KAB. CIANJUR	SMA NEGERI 1 SINDANGKERTA SMA NEGERI 2 LEMBANG SMA NEGERI 2 PADALARANG
	KEC. CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR	
	KEC. CAMPAKA MULYA, KAB. CIANJUR	
	KEC. DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA	
	KEC. MANIIS, KAB. PURWAKARTA	

## 13. KOTA BANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANDUNG
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 BANDUNG
	KEC.LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 BANDUNG
	KEC.CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 4 BANDUNG
	KEC.CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 5 BANDUNG
	KEC.PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 BANDUNG
	KEC.CIMENYAN, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 7 BANDUNG
	KEC.CILENGKRANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 8 BANDUNG
	KEC.CILEUNYI, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 9 BANDUNG
	KEC.BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 10 BANDUNG
	KEC.BALEENDAH, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 11 BANDUNG
	KEC.DAYEUKHOKLOT, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 12 BANDUNG
	KEC.MARGAHAYU, KAB. BANDUNG	SMA NEGERI 13 BANDUNG
		SMA NEGERI 14 BANDUNG
		SMA NEGERI 15 BANDUNG
		SMA NEGERI 16 BANDUNG
		SMA NEGERI 17 BANDUNG
	SMA NEGERI 18 BANDUNG	
	SMA NEGERI 19 BANDUNG	
	SMA NEGERI 20 BANDUNG	
	SMA NEGERI 21 BANDUNG	
	SMA NEGERI 22 BANDUNG	
	SMA NEGERI 23 BANDUNG	
	SMA NEGERI 24 BANDUNG	
	SMA NEGERI 25 BANDUNG	
	SMA NEGERI 26 BANDUNG	
	SMA NEGERI 27 BANDUNG	

## 14. KOTA CIMAHI

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KOTA CIMAHI	SMA NEGERI 1 CIMAHI
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 CIMAHI
	KEC. CISARUA, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 3 CIMAHI
	KEC. NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 4 CIMAHI
	KEC. PARONGPONG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 5 CIMAHI
	KEC. PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT	SMA NEGERI 6 CIMAHI
	KEC. BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG BARAT	
	KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG	
	KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG	
	KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG	

	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	
	KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG	
	KEC. MARGAASIH, KAB. BANDUNG	

## 15. KABUPATEN BANDUNG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIWIDEY
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 1 KATAPANG
	KEC. BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 SOREANG
	KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 MARGAASIH
	KEC. PANYILEUKAN, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 MARGAHAYU
	KEC. GEDEBAGE, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BALEENDAH
	KEC. CINAMBO, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BOJONGSOANG
	KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 DAYEUEHKOLOT
	KEC. BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 BANJARAN
	KEC. BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 PANGALENGAN
	KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG	SMA NEGERI 1 CIPARAY
	KEC. CIMAH SELATAN, KOTA CIMAH	SMA NEGERI 1 KERTASARI
	KEC. JATINANGOR, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 MAJALAYA
	KEC. TANJUNGSARI, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 2 MAJALAYA
	KEC. CIMANGGUNG, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIKANCUNG
	KEC. LIMBANGAN, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 CILEUNYI
	KEC. KADUNGORA, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 RANCAEKEK
	KEC. TALEGONG, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 CICALENGKA
KEC. CISEWU, KAB. GARUT	SMA NEGERI 1 NAGREG	

## 16. KABUPATEN SUMEDANG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN SUMEDANG	SMA NEGERI 1 CIMALAKA
		SMA NEGERI 1 SUMEDANG
		SMA NEGERI 2 CIMALAKA
		SMA NEGERI 2 SUMEDANG
		SMA NEGERI 3 SUMEDANG
		SMA NEGERI TANJUNGGAL
		SMA NEGERI CIMANGGUNG
		SMA NEGERI CONGGEANG
		SMA NEGERI DARMARAJA
		SMA NEGERI JATINANGOR
		SMA NEGERI JATINUNGGAL
		SMA NEGERI RANCAKALONG
		SMA NEGERI SITURAJA
	SMA NEGERI TANJUNGSARI	
	SMA NEGERI TOMO	

## 17. KABUPATEN INDRAMAYU

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. CANTIGI	SMA NEGERI 1 CANTIGI
	KEC. SINDANG	SMA NEGERI 1 INDRAMAYU
	KEC. PASEKAN	SMA NEGERI 1 LOHBENER
	KEC. ARAHAN	SMA NEGERI 1 SINDANG
	KEC. LOHBENER	SMA NEGERI 2 INDRAMAYU
	KEC. INDRAMAYU	
	KEC. BALONGAN	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. SLIYEG	
	KEC. JATIBARANG	
	KEC. JUNTINYUAT	
	KEC. LELEA	
<b>B</b>	KEC. KARANGAMPEL	SMA NEGERI 1 JUNTINYUAT
	KEC. KRANGKENG	SMA NEGERI 1 KRANGKENG
	KEC. JUNTINYUAT	SMA NEGERI 1 KEDOKANBUNDER
	KEC. BALONGAN	SMA NEGERI 1 SUKAGUMIWANG
	KEC. SLIYEG	SMA NEGERI 1 TUKDANA
	KEC. JATIBARANG	SMA NEGERI 1 SLIYEG
	KEC. KEDOKANBUNDER	SMA NEGERI 1 JATIBARANG
	KEC. BANGODUA	
	KEC. SUKAGUMIWANG	
	KEC. KERTASEMAYA	
	KEC. TUKDANA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. KAPETAKAN, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	
	KEC. KALIWEDI, KAB. CIREBON	
	KEC. SUSUKAN, KAB. CIREBON	
	KEC. GEGESIK, KAB. CIREBON	
KEC. GUNUNGJATI, KAB. CIREBON		
KEC. JATITUJUH, KAB MAJALENGKA		
<b>C</b>	KEC. TERISI	SMA NEGERI 1 LELEA
	KEC. CIKEDUNG	SMA NEGERI 1 TERISI
	KEC. LOSARANG	SMA NEGERI 1 KANDANGHAUR
	KEC. LELEA	SMA NEGERI 1 LOSARANG
	KEC. KROYA	SMA NEGERI 1 BONGAS
	KEC. GABUSWETAN	SMA NEGERI 1 KROYA
	KEC. KANDANGHAUR	SMA NEGERI 1 GABUSWETAN
	KEC. BONGAS	
	KEC. PATROL	
	KEC. WIDASARI	
	KEC. BANGODUA	
	KEC. LOHBENER	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. UJUNG JAYA, KAB. SUBANG	
<b>D</b>	KEC. SUKRA	SMA NEGERI 1 ANJATAN
	KEC. ANJATAN	SMA NEGERI 1 GANTAR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. HAURGEULIS	SMA NEGERI 1 SUKRA SMA NEGERI 1 HAURGEULIS
	KEC. GANTAR	
	KEC. PATROL	
	KEC. BONGAS	
	KEC. KROYA	
	KEC. GABUSWETAN	
	KEC. TERISI	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. PUSAKANAGARA, KAB. SUBANG	
	KEC. COMPRENG, KAB. SUBANG	
	KEC. CIPUNEGARA, KAB. SUBANG	
	KEC. BUAHDUA, KAB. SUBANG	

## 18. KABUPATEN MAJALENGKA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. MAJA	SMA NEGERI 1 MAJA SMA NEGERI 1 CIKIJING SMA NEGERI 1 TALAGA SMA NEGERI 1 BANTARUJEG
	KEC. ARGAPURA	
	KEC. TALAGA	
	KEC. CIKIJING	
	KEC. CINGAMBUL	
	KEC. BANJARAN	
	KEC. BANTARUJEG	
	KEC. LEMAHSUGIH	
	KEC. MALAUSMA	
<b>B</b>	KEC. LEUWIMUNDING	SMA NEGERI 1 LEUWIMUNDING SMA NEGERI 1 RAJAGALUH SMA NEGERI 1 SINDANGWANGI SMA NEGERI 1 SUKAHAJI SMA NEGERI 1 MAJALENGKA SMA NEGERI 2 MAJALENGKA
	KEC. RAJAGALUH	
	KEC. SINDANGWANGI	
	KEC. SINDANG	
	KEC. SUKAHAJI	
	KEC. MAJALENGKA	
	KEC. CIGASONG	
	KEC. PANYINGKIRAN	
<b>C</b>	KEC. JATITUJUH	SMA NEGERI 1 JATITUJUH SMA NEGERI 1 LIGUNG SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA SMA NEGERI 1 JATIWANGI SMA NEGERI 1 KADIPATEN SMA NEGERI 1 KASOKANDEL
	KEC. KERTAJATI	
	KEC. LIGUNG	
	KEC. SUMBERJAYA	
	KEC. KADIPATEN	
	KEC. DAWUAN	
	KEC. KASOKANDEL	
	KEC. JATIWANGI	
	KEC. PALASAH	

## 19. KOTA CIREBON

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KOTA CIREBON	SMA NEGERI 1 CIREBON SMA NEGERI 2 CIREBON SMA NEGERI 3 CIREBON
	KEC. KEDAWUNG, KAB. CIREBON	
	KEC. TENGAH TANI, KAB. CIREBON	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. GUNUNG JATI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 4 CIREBON
	KEC. SURANENGGALA, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 5 CIREBON
	KEC. TALUN, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 6 CIREBON
	KEC. MUNDU, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 7 CIREBON
		SMA NEGERI 8 CIREBON
		SMA NEGERI 9 CIREBON

## 20. KABUPATEN CIREBON

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. LOSARI	SMA NEGERI 1 BABAKAN
	KEC. CILEDUG	SMA NEGERI 1 CILEDUG
	KEC. WALED	SMA NEGERI 1 LOSARI
	KEC. BABAKAN	SMA NEGERI 1 PABEDILAN
	KEC. PABEDILAN	SMA NEGERI 1 WALED
	KEC. PANGENAN	
	KEC. PASALEMAN	
	KEC. PABUARAN	
	KEC. GEBANG	
	DAERAH IRISAN :	
	KAB. BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH	
<b>B</b>	KEC. LEMAHABANG	SMA NEGERI 1 ASTANAJAPURA
	KEC. SEDONG	SMA NEGERI 1 KARANG WARENG
	KEC. SUSUKAN LEBAK	SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
	KEC. KARANGWARENG	
	KEC. ASTANAJAPURA	
	KEC. MUNDU	
	KEC. KARANGSEMBUNG	
	DAERAH IRISAN : KEC. PANGENAN	
<b>C</b>	KEC. SUMBER	SMA NEGERI 1 BEBER
	KEC. TALUN	SMA NEGERI 1 DUKUPUNTANG
	KEC. DUKUPUNTANG	SMA NEGERI 1 SUMBER
	KEC. DEPOK	
	KEC. BEBER	
	KEC. GREGED	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. PLUMBON KEC. PANCALANG, KAB. KUNINGAN KEC. CILIMUS, KAB. KUNINGAN KEC. SINDANGWANGI, KAB. MAJALENGKA	
<b>D</b>	KEC. KAPETAKAN	SMA NEGERI 1 ARJAWINANGUN
	KEC. SUSUKAN	SMA NEGERI 1 GEGESIK
	KEC. GEGESIK	SMA NEGERI 1 KALIWEDI
	KEC. ARJAWINANGUN	SMA NEGERI 1 KAPETAKAN
	KEC. KALIWEDI	SMA NEGERI 1 SUSUKAN
	KEC. PANGURAGAN	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU	
<b>E</b>	KEC. PALIMANAN	SMA NEGERI 1 CIWARINGIN
	KEC. GEMPOL	SMA NEGERI 1 PALIMANAN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. CIWARINGIN	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. JATIWANGI, KAB. MAJALENGKA	
<b>F</b>	KEC. JAMBLANG	SMA NEGERI 1 JAMBLANG SMA NEGERI 1 PLUMBON SMA NEGERI 1 SURANENGGALA
	KEC. PLUMBON	
	KEC. PLERED	
	KEC. KLANGENAN	
	KEC. SURANENGGALA	
	KEC. WERU	
	KEC. GUNUNG JATI	
	KEC. TENGAHTANI	
	KEC. KEDAWUNG	

## 21. KABUPATEN KUNINGAN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. SUBANG	SMA NEGERI 1 CIGUGUR SMA NEGERI 1 DARMA SMA NEGERI 1 KADUGEDE SMA NEGERI 1 KUNINGAN SMA NEGERI 1 SUBANG SMA NEGERI 2 KUNINGAN SMA NEGERI 3 KUNINGAN
	KEC. DARMA	
	KEC. KADUGEDE	
	KEC. CILEBAK	
	KEC. NUSAHERANG	
	KEC. SELAJAMBE	
	KEC. KUNINGAN	
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SINDAGAGUNG	
	KEC. KRAMATMULYA	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA KEC. RANCAH, KAB. CIAMIS	
<b>B</b>	KEC. CILIMUS	SMA NEGERI 1 CILIMUS SMA NEGERI 1 JALAKSANA SMA NEGERI 1 MANDIRANCAN SMA NEGERI 1 PASAWAHAN
	KEC. JALAKSANA	
	KEC. CIGANDAMEKAR	
	KEC. JAPARA	
	KEC. PASAWAHAN	
	KEC. MANDIRANCAN	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. KRAMATMULYA KEC. PANCALANG KEC. GREGED, KAB. CIREBON KEC. BEBER, KAB. CIREBON	
<b>C</b>	KEC. GARAWANGI	SMA NEGERI 1 CIAWIGEBANG SMA NEGERI 1 CINIRU SMA NEGERI 1 GARAWANGI SMA NEGERI 1 LEBAKWANGI
	KEC. CINIRU	
	KEC. HANTARA	
	KEC. CIAWIGEBANG	
	KEC. CIPICUNG	
	KEC. LEBAKWANGI	
	KEC. MELEBER	
	DAERAH IRISAN : KEC. KALIMANGGIS KEC. CIAWI	
<b>D</b>	KEC. LURAGUNG	SMA NEGERI 1 CIBINGBIN SMA NEGERI 1 CIDAHU
	KEC. CIWARU	

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. KARANGKANCANA	SMA NEGERI 1 CIWARU SMA NEGERI 1 LURAGUNG
	KEC. CIMAHI	
	KEC. CIDAHU	
	KEC. CIBINGBIN	
	KEC. CIBEUREUM	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIAWIGEBANG KEC. KALIMANGGIS KEC. BANJARHARJO, KAB. BREBES, JAWA TENGAH	

## 22. KABUPATEN GARUT

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KABUPATEN GARUT	SMA NEGERI 1 GARUT
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 2 GARUT
	KEC. CIBUGEL, KAB. SUMEDANG	SMA NEGERI 3 GARUT
	KEC. SALAWU, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 4 GARUT
	KEC. CIAWI, KAB. TASIKMALAYA	SMA NEGERI 5 GARUT
		SMA NEGERI 6 GARUT
		SMA NEGERI 7 GARUT
		SMA NEGERI 8 GARUT
		SMA NEGERI 9 GARUT
		SMA NEGERI 10 GARUT
		SMA NEGERI 11 GARUT
		SMA NEGERI 12 GARUT
		SMA NEGERI 13 GARUT
		SMA NEGERI 14 GARUT
		SMA NEGERI 15 GARUT
		SMA NEGERI 16 GARUT
		SMA NEGERI 17 GARUT
		SMA NEGERI 18 GARUT
		SMA NEGERI 19 GARUT
		SMA NEGERI 20 GARUT
		SMA NEGERI 21 GARUT
		SMA NEGERI 22 GARUT
		SMA NEGERI 23 GARUT
		SMA NEGERI 24 GARUT
		SMA NEGERI 25 GARUT
		SMA NEGERI 26 GARUT
		SMA NEGERI 27 GARUT
		SMA NEGERI 28 GARUT
		SMA NEGERI 29 GARUT
		SMA NEGERI 30 GARUT
		SMA NEGERI 31 GARUT
		SMA NEGERI 32 GARUT

## 23. KABUPATEN TASIKMALAYA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. CIAWI	SMA NEGERI 1 CIAWI
	KEC. KADIPATEN	SMA NEGERI 1 JAMANIS
	KEC. PAGERAGEUNG	SMA NEGERI 1 CISAYONG

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. SUKARESIK	
	KEC. JAMANIS	
	KEC. SUKAHENING	
	KEC. RAJAPOLAH	
	KEC. CISAYONG	
	KEC. SUKARATU	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. PANUMBANGAN, KAB. CIAMIS	
	KEC. PANJALU, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. MALANGBONG, KAB. GARUT	
	<b>B</b>	
KEC. SARIWANGI		
KEC. LEUWISARI		
KEC. SINGAPARNA		
DAERAH IRISAN :		
KEC. CILAWU, KAB. GARUT		
<b>C</b>	KEC. SINGAPARNA	SMA NEGERI 1 SINGAPARNA SMA NEGERI 2 SINGAPARNA
	KEC. PADAKEMBANG	
	KEC. SALAWU	
	KEC. MANGUNREJA	
	KEC. SUKARAME	
	KEC. TANJUNG JAYA	
	KEC. LEUWISARI	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CILAWU, KAB. GARUT	
<b>D</b>	KEC. MANONJAYA	SMA NEGERI 1 MANONJAYA SMA NEGERI 1 CINEAM
	KEC. GUNUNGTANJUNG	
	KEC. CINEAM	
	KEC. KARANGJAYA	
	KEC. SALOPA	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA	
	KEC. CIAMIS, KAB. CIAMIS	
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
<b>E</b>	KEC. TARAJU	SMA NEGERI 1 TARAJU SMA NEGERI 1 SODONGHILIR
	KEC. PUSPAHIANG	
	KEC. BOJONGGAMBIR	
	KEC. SODONGHILIR	
	KEC. PARUNG PONTENG	
<b>F</b>	KEC. JATIWARAS	SMA NEGERI 1 JATIWARAS SMA NEGERI 1 SALOPA SMA NEGERI 1 CIKATOMAS SMA NEGERI 1 CIKALONG
	KEC. SUKARAJA	
	KEC. SALOPA	
	KEC. CIKATOMAS	
	KEC. CIKALONG	
	KEC. PANCATENGAH	



Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>G</b>	KEC. BANTARKALONG	SMA NEGERI 1 BANTARKALONG SMA NEGERI 1 CIPATUJAH SMA NEGERI 1 KARANGNUNGGAL
	KEC. BOJONG ASIH	
	KEC. CULAMEGA	
	KEC. CIBALONG	
	KEC. KARANGNUNGGAL	
	KEC. CIPATUJAH	

## 24. KOTA TASIKMALAYA

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KOTA TASIKMALAYA	SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA SMA NEGERI 6 TASIKMALAYA SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA SMA NEGERI 9 TASIKMALAYA SMA NEGERI 10 TASIKMALAYA
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. JATIWARAS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARAJA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. SUKARATU, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CISAYONG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS	
	KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS	

## 25. KABUPATEN CIAMIS

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. RAJADESA	SMA NEGERI 1 CIHAURBEUTI SMA NEGERI 1 KAWALI SMA NEGERI 1 LUMBUNG SMA NEGERI 1 PANAWANGAN SMA NEGERI 1 RANCAH SMA NEGERI 1 SUKADANA
	KEC. CIHAURBEUTI	
	KEC. KAWALI	
	KEC. LUMBUNG	
	KEC. PANAWANGAN	
	KEC. SUKADANA	
	KEC. RANCAH	
	KEC. CIPAKU	
	KEC. TAMBAKSARI	
	KEC. PANUMBANGAN	
	KEC. PANJALU	
	KEC. JATINAGARA	
	KEC. SUKAMANTRI	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. BAREGBEG	
	KEC. CIAMIS	
	KEC. CIKONENG	
	KEC. SINDANGKASIH	
	KEC. SADANANYA	
	KEC. JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA	
KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA		

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
	KEC. SUKARESIK, KAB. TASIKMALAYA KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA KEC. SUBANG, KAB. KUNINGAN KEC. CILEBAK, KAB. KUNINGAN KEC. SELAJAMBE, KAB. KUNINGAN KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
<b>B</b>	KEC. SINDANGKASIH KEC. BAREGBEG KEC. CIAMIS KEC. CIKONENG KEC. CIJEUNGJING KEC. SADANANYA DAERAH IRISAN : KEC. KAWALI KEC. CIPAKU KEC. SUKADANA KEC. CISAGA KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA	SMA NEGERI 1 BAREGBEG SMA NEGERI 1 SINDANGKASIH SMA NEGERI 1 CIAMIS SMA NEGERI 2 CIAMIS SMA NEGERI 3 CIAMIS
<b>C</b>	KEC. BANJARSARI KEC. CIMARAGAS KEC. CISAGA KEC. LAKBOK KEC. PAMARICAN KEC. PURWADADI KEC. CIDOLOG DAERAH IRISAN : KEC. BANJAR, KOTA BANJAR KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR KEC. LANGENSARI, KOTA BANJAR KEC. LANGKAPLANCAR, KAB. PANGANDARAN KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN KEC. DAYEUHLUHUR, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH KEC. SIDAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH KEC. WANAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	SMA NEGERI 1 BANJARSARI SMA NEGERI 1 CIMARAGAS SMA NEGERI 1 CISAGA SMA NEGERI 1 LAKBOK SMA NEGERI 1 PAMARICAN SMA NEGERI 2 BANJARSARI

## 26. KOTA BANJAR

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KOTA BANJAR DAERAH IRISAN : KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS	SMA NEGERI 1 BANJAR SMA NEGERI 2 BANJAR SMA NEGERI 3 BANJAR

KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS	
KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS	
KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS	
KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	

## 27. KABUPATEN PANGANDARAN

Zonasi	Kecamatan	Daftar SMA/MA
<b>A</b>	KEC. MANGUNJAYA	SMA NEGERI 1 MANGUNJAYA
	KEC. PADAHERANG	
	KEC. KALIPUCANG	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
<b>B</b>	KEC. PANGANDARAN	SMA NEGERI 1 PANGANDARAN
	KEC. SIDAMULIH	
	KEC. KALIPUCANG	
	KEC. PARIGI	
	DAERAH IRISAN :	
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH	
<b>C</b>	KEC. PARIGI	SMA NEGERI 1 PARIGI
	KEC. CIJULANG	
	KEC. CIMERAK	
	KEC. CIGUGUR	
	KEC. SIDAMULIH	
	KEC. PANGANDARAN	
	KEC. LANGKAPLANCAR	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. CIKALONG, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. CIDOLOG, KAB. CIAMIS	
<b>D</b>	KEC. LANGKAPLANCAR	SMA NEGERI 1 LANGKAPLANCAR
	KEC. CIGUGUR	
	DAERAH IRISAN :	
	KEC. KARANGJAYA, KAB. TASIKMALAYA	
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

